

## MANFAAT, PANDANGAN, DAN ALTERNATIF PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI DUA KELOMPOK RUJUKAN, KABUPATEN PEMALANG

*(Benefit, View, and Alternative of Social Forestry Program in Two Reference Groups,  
Pemalang Regency)*

Dicky Rachmawan<sup>1</sup>, Francisia Saveria Sika Ery Seda<sup>2</sup>, Robert Siburian<sup>1</sup> & Danang Kuncara Sakti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pusat Riset Masyarakat dan Budaya - Badan Riset dan Inovasi Nasional,  
Jakarta Selatan, Jakarta, 12710, Indonesia  
e-mail: dickybrin@gmail.com, robertsdes1970@gmail.com

<sup>2</sup>Departemen Sosiologi FISIP UI, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, Jawa Barat, 10430, Indonesia;  
e-mail: saveria09@gmail.com

<sup>3</sup>Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta  
e-mail: kuncara.sakti.1975@gmail.com

Diterima 3 Mei 2021, direvisi 21 Juli 2022, disetujui 25 Juli 2022

### ABSTRACT

*Social forestry program expected to give space for people in forest management, improve livelihood, and conserve the environment at once to decrease poverty rate on people who live around the forest. This article aims to describe the benefit of community member which is complemented by deepening of view and alternative of social forestry program in Kelompok Tani Hutan Gunung Gajah Lestari (KTH GGL) and Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rawa Sakti (LMDH RS). Qualitative approach in case study form is used which interview 49 informants include managements and members that accompanied by focus group discussion as data triangulation which processed by Nvivo application and Microsoft Excel. The result shows social forestry program has viewed giving benefit although it felt not optimal by the members in both groups. However, rough calculation on utilization of forest areas tends possibly to contribute around Rp.1,5-3 million rupiah/planting period. The utilization of forest areas is revival means or additional income where social-economic context is needed to be understood on identify commodity alternative that can be developed in the further time. The rest is the need for natural science approach which can answer the confusion of community to find alternatives commodity which more give revenue.*

*Keywords: Social forestry, benefit, view, alternative, and community.*

### ABSTRAK

Penguatan kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja kelompok tani sehingga Program perhutanan sosial diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengelola hutan, meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan lingkungan sekaligus mengurangi rona kemiskinan yang cenderung berada pada masyarakat sekitar hutan. Tujuan artikel ini untuk menggambarkan manfaat bagi anggota kelompok yang dilengkapi dengan pendalaman tentang pandangan pengimplementasian dan alternatif dari program perhutanan sosial khususnya pada Kelompok Tani Hutan Gunung Gajah Lestari (KTH GGL) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rawa Sakti (LMDH RS). Pendekatan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus digunakan dengan mewawancarai 49 informan pengurus dan anggota disertai dengan *focus group discussion* sebagai triangulasi data yang diolah menggunakan aplikasi Nvivo dan *Microsoft Excel*. Hasilnya, program perhutanan sosial dipandang memberikan manfaat meskipun dirasakan kurang maksimal oleh para anggota KTH GGL dan LMDH RS. Namun secara perhitungan kasar pemanfaatan kawasan hutan cenderung dapat berkontribusi sekitar Rp.1,5-3 juta/masa tanam. Pemanfaatan kawasan hutan adalah cara bertahan hidup atau penambah penghasilan dimana konteks sosial-ekonomi penting untuk dipahami dalam mengidentifikasi alternatif komoditas yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Selibuhnya perlu ada penelitian dari sudut pandang ilmu alam yang dapat menjawab kebingungan komunitas untuk mencari tahu komoditas alternatif yang lebih menguntungkan.

Kata kunci: Perhutanan sosial, manfaat, pandangan, alternatif, dan komunitas.

## I. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma global pengelolaan hutan yang dahulu meminggirkan masyarakat dan mengarah deforestasi selama beberapa dekade terakhir (H. Hidayat, 2015; Kaskoyo *et al.*, 2017; Moeliono *et al.*, 2017; Nath *et al.*, 2016; Noveria *et al.*, 2005; Royer *et al.*, 2018; Wright *et al.*, 2016) juga terjadi di Indonesia yang semakin populer dengan sebutan Perhutanan Sosial (Firdaus, 2018; Fisher *et al.*, 2018; A. Susilo, 2011; Y. S. Susilo & Nairobi, 2019). Program perhutanan sosial diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengelola hutan, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus melestarikan lingkungan (Asmin *et al.*, 2019; Kuncoro & Cahyani, 2018; Rakatama & Pandit, 2020) sebagai solusi pengurangan rona kemiskinan yang masih cenderung berada pada masyarakat di sekitar hutan (FWI/GFW, 2001; H. Hidayat, 2015).

Sejak dipopulerkan dan diimplementasikannya program perhutanan sosial di tahun 2016 (Pambudi, 2020) secara signifikan luasan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat meningkat secara signifikan dari 449 ribu hektar di tahun 2014 menjadi 4,022 juta hektar di tahun 2019 (Ekawati *et al.*, 2020; Firdaus, 2018). Terdapat beberapa model dari lima skema perhutanan sosial yang ada di Indonesia, dua model yang menjadi rujukan di antaranya yang disebutkan oleh Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berada di Kabupaten Pematang Jaya yaitu Kelompok Tani Hutan Gunung Gajah Lestari dengan Izin Pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rawa Sakti (KLHK, 2017a, 2017b; Rachmawan, 2020). Sehingga menarik untuk menelaah seperti apa pengimplementasian pengelolaan perhutanan sosial oleh masyarakat pada dua model tersebut. Sebelumnya perlu diketahui

bahwa Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka Kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan system Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang digagas oleh Perum Perhutani (CIFOR, 2007). Dimana cikal bakal dari PHBM sendiri dalam pengikutsertaan masyarakat dirintis sejak abad 19 sejak zaman penjajahan Belanda yang disebut dengan Tanguya atau banyak dikenal tumpang sari (Royer *et al.*, 2018).

Telah terdapat banyak penelitian yang mengkaji tentang dampak perhutanan sosial di Indonesia baik dampak positif atau mengkaji faktor negatif pengimplementasian program perhutanan sosial (Kuncoro & Cahyani, 2018; Moeliono *et al.*, 2017; Rakatama & Pandit, 2020; Santika *et al.*, 2019; Wulandari & Kurniasih, 2019) dan terdapat pula penelitian yang menilai potensi wisata, potensi nilai ekonomi pengelolaan hutan oleh masyarakat atau pada suatu objek wisata (Hayati, 2021; Hendarto *et al.*, 2019; D. C. Hidayat *et al.*, 2020; Jariyah, 2019; Lugina *et al.*, 2019; Saputro *et al.*, 2020; Surati *et al.*, 2019). Berbeda dari penelitian sebelumnya, tulisan ini menawarkan penggambaran manfaat bagi anggota kelompok yang dilengkapi dengan pendalaman tentang pandangan pengimplementasian dan alternatif dari program perhutanan sosial khususnya pada Kelompok Tani Hutan Gunung Gajah Lestari dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rawa Sakti, Kabupaten Pematang Jaya. Diharapkan hasil dari tulisan ini dapat menjadi penjelasan deskriptif sebagai data baik untuk penelitian selanjutnya untuk menelaah lebih dalam atau data untuk intervensi yang dapat digunakan oleh pihak di luar kelompok dalam kegiatan pemberdayaan dua kelompok tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Soft System*

*Methodology* (selanjutnya disebut SSM) yang menitikberatkan pandangan dan pemahaman (*worldview*) *stakeholder* kunci utamanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai realitas sosial yang kompleks tentang “*real world*” tentang pengimplementasian perhutanan sosial (Checkland, 2000; Mehregan *et al.*, 2012; Yovani, 2013). Dipilihnya dua kelompok rujukan KTH Gunung Gajah Lestari dan LMDH Rawa Sakti adalah saran yang disampaikan oleh KLHK untuk melihat realitas sosial program perhutanan sosial didasarkan hasil diskusi terbatas/*Focus Group Discussion* antara penulis dan KLHK (Rachmawan, 2020). Penelitian lapangan dilakukan pada akhir bulan Januari hingga minggu ketiga bulan Februari 2021 di dua kelompok yang berbeda lokasi yaitu pada Kelompok Tani Hutan Gunung Gajah Lestari (selanjutnya disebut KTH GGL), Desa Gongseng, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rawa Sakti (selanjutnya disebut LMDH RS), Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.

## B. Pengumpulan Data

Teknik wawancara mendalam secara purposive dilakukan pada beberapa informan kunci di masing-masing kelompok khususnya pada pengurus kelompok yang berjumlah 7 orang informan. Kemudian dilakukan wawancara semi-terstruktur pada 49 informan yang bestatus anggota secara purposive. Dimana informan anggota KTH GGL berjumlah 24 orang dan LMDH RS yang berjumlah 25 orang.

Penggalian data lebih banyak dilakukan pada informan berstatus anggota sejalan dengan tujuan dari tulisan ini untuk melihat seberapa besar manfaat dari pengimplementasian program perhutanan sosial dan memahami kelompok secara mendalam. Selain wawancara mendalam, kegiatan observasi juga dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) yang

dilakukan pada dua kelompok tersebut.

## C. Metode dan Analisis Data

Pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus digunakan khususnya pada dua kelompok yang telah disebutkan sebelumnya. Penganalisisan yang dilakukan adalah analisis deskriptif yang didapat dari proses triangulasi informasi antara pengurus dan anggota kelompok. Kemudian, informasi yang didapatkan selanjutnya dikelola dan diolah dengan aplikasi Nvivo untuk dilakukannya *open*, *axial*, dan *selected coding*.

Setelah dihimpunnya data dari proses *selected*, kemudian data diolah lebih lanjut menggunakan *Microsoft Excel* khususnya untuk perhitungan manfaat anggota dan penggambaran yang membandingkan antar kedua kelompok. Data yang bersifat deskriptif angka khususnya keuntungan dalam bentuk ekonomi kemudian dilengkapi dengan pemaknaan yang didapatkan dari wawancara mendalam yang mengandung pandangan dan alasan khususnya yang disampaikan oleh informan berstatus anggota kelompok.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus pembahasan pada artikel ini hanya dibatasi pada manfaat ekonomi pada dua kelompok yaitu KTH GGL dan LMDH RS. Alasan mengapa penelaahaan aspek manfaat ekonomi pada tingkat anggota menjadi penting karena telah terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa pengelolaan perhutanan sosial telah memberikan manfaat ekonomi meskipun kurang dijelaskan secara spesifik seperti yang dilakukan oleh Nurrochmat *et al.* (2019). Adanya perasaan saling menguntungkan secara ekonomi dari pengelolaan hutan dapat meningkatkan kolaborasi dan manfaat lanjutan bagi kelompok itu sendiri (Kelly, 2018; Pujo *et al.*, 2018; Quazi *et al.*, 2008; Timko & Webbe, 2020; Weissberg *et al.*, 2018). Lebih lanjut penelitian-penelitian sebelumnya

juga menyampaikan keuntungan yang terdistribusi secara adil di dalam kelompok adalah aspek yang penting atau esensial yang mempengaruhi pengelolaan hutan di dalam kelompok dalam proses kolaborasi (Asmin *et al.*, 2019; Essougong *et al.*, 2019; Moeliono *et al.*, 2017; Pujo *et al.*, 2018; Royer *et al.*, 2018).

#### **A. Kepemilikan Lahan (Pribadi), Luas Garapan, dan Aktivitas Pemanfaatan**

Sebelum membahas tentang manfaat ekonomi yang didapatkan oleh para anggota baik di KTH GGL atau di LMDH Rawa Sakti, perlu ditelaah terlebih dahulu seperti apa kepemilikan lahan pribadi antara anggota di dua kelompok tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun maka 66,66% informan anggota di KTH GGL tidak memiliki lahan pribadi untuk bertanam, kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di LMDH RS yang justru 68,00% memiliki lahan milik pribadi. Didasarkan hal tersebut maka menjadi berbeda antara kebutuhan lahan anggota KTH GGL dengan LMDH RS.

Kemudian setelah terlihatnya perbedaan kebutuhan lahan garapan, maka penting juga untuk melihat luasan garapan yang pertama dilihat pada tingkat kelompok. Maka terdapat perbedaan luasan pengelolaan kawasan hutan antara KTH GGL yang mengelola 290 hektar dengan 195 anggota yang tercatat di dalam SK dan LMDH RS yang hanya mengelola 73,6 hektar dengan 124 orang anggota yang tercatat di dalam SK. Perbedaan luasan kawasan hutan yang digarap ini yang berdampak pada perbedaan luas garapan di antara KTH GGL dengan LMDH Rawa Sakti di tingkat anggota. Dari 49 anggota baik KTH GGL dan LMDH Rawa Sakti, maka kebanyakan informan di KTH GGL menggarap seluas  $\pm 1$  hektar dan anggota LMDH Rawa Sakti cenderung memiliki luas lahan garapan yang lebih kecil antara  $\pm 0,25$  sampai 0,5 hektar. Lebih lanjut, meskipun terdapat perbedaan luasan lahan

garapan namun hal tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan baik di KTH GGL atau LMDH RS. Karena ternyata luas atau kecilnya lahan yang digarap oleh anggota bergantung pada kemampuan finansial (modal dalam bentuk uang) dan fisik tiap-tiap anggota untuk mengolah dan menggarap kawasan hutan. Tetapi di sisi lain, tetap ada anggota yang merasa ini masih menjadi masalah khususnya di KTH GGL.

Kegiatan pemanfaatan baik pada KTH GGL atau LMDH RS kebanyakan masih berbasis lahan seperti *agroforestry* (dalam tulisan ini diartikan sebagai kegiatan menanam tanaman di bawah tegakan pohon jati dari tipe kawasan hutan produksi pada konteks KTH GGL dan tegakan pinus dari tipe kawasan hutan lindung pada konteks LMDH RS). Perbedaan antara KTH GGL dan LMDH RS adalah jenis tanaman yang ditanam seperti menanam tanaman buah atau tanaman kayu yang cenderung lebih banyak dilakukan oleh anggota di KTH GGL daripada di LMDH RS. Keengganan informan anggota di LMDH RS untuk menanam komoditas buah-buahan disebabkan karena lamanya waktu untuk dipanen, adanya tambahan biaya perawatan seperti pupuk, pandangan yang melihat bahwa hal tersebut kurang menghasilkan, dimana faktor kebutuhan atau tekanan ekonomi adalah hal harus mereka hadapi waktu yang dekat untuk memenuhi kebutuhan.

Tekanan ekonomi dengan keterbatasan modal ini yang menurut informan pengurus LMDH RS banyak anggota yang memiliki pola pikir instan dalam memanfaatkan hasil hutan, yang cenderung memanfaatkan kawasan hutan dengan menanam komoditas berdaya jual rendah, sedikit modal, dan terperangkap pada kebiasaan karena mudah untuk menjualnya seperti menanam singkong. Berbeda dari yang terjadi di LMDH RS, pada KTH GGL anggota informan masih memiliki keinginan untuk menanam tanaman buah-buahan yang didapat dari bantuan bibit Dinas Pertanian



setempat atau menanam tanaman keras seperti Jati Solomon dari kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga. Tekanan ekonomi juga dihadapi oleh informan anggota di KTH GGL, tetapi pada kenyataannya mereka justru menanam komoditas yang justru memerlukan modal seperti komoditas jagung untuk dapat bertahan hidup. Maka dari itu mari kita lihat seperti apa perbedaan keuntungan/kerugian didasarkan pandangan dan perhitungan kasar yang didapat oleh anggota informan baik dari KTH GGL dan LMDH RS yang memiliki perbedaan dalam memanfaatkan kawasan hutan pada bagian selanjutnya.

Pada praktek perhitungannya komoditas yang dapat dihitung di KTH GGL berfokus pada komoditas jagung saja, karena tanaman buah atau tanaman keras baru ditanam, sedangkan di LMDH RS terdapat komoditas seperti cabai, singkong, jagung, bahkan daun bawang. Namun terdapat fakta yang sama antara kedua kelompok dimana komoditas pisang tidak dapat dihitung keuntungannya karena kebanyakan dari informan anggota yang menanam pisang menyebutkan pisang tidak bisa ditentukan masa panennya.

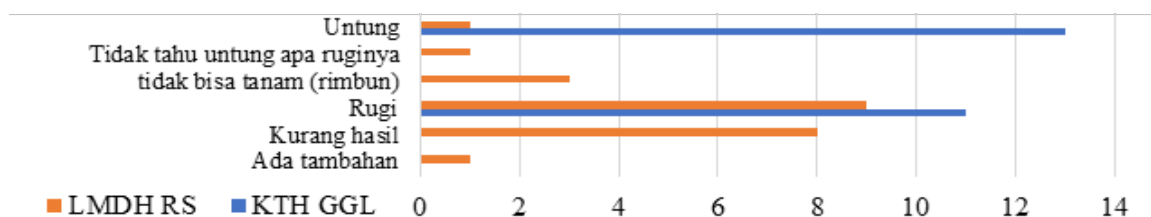
### B. Pandangan dan Perhitungan Kasar Untung atau Rugi di KTH GGL dan LMDH RS

Penggunaan SSM yang berdasar kepada bagaimana para informan memahami dan melihat realitas sosial sebagai pandangan/worldview dapat menjadi refleksi kompleksnya pengimplementasian sebuah kebijakan dalam konteks ini adalah Program Perhutanan Sosial (Checkland, 2000). Pada

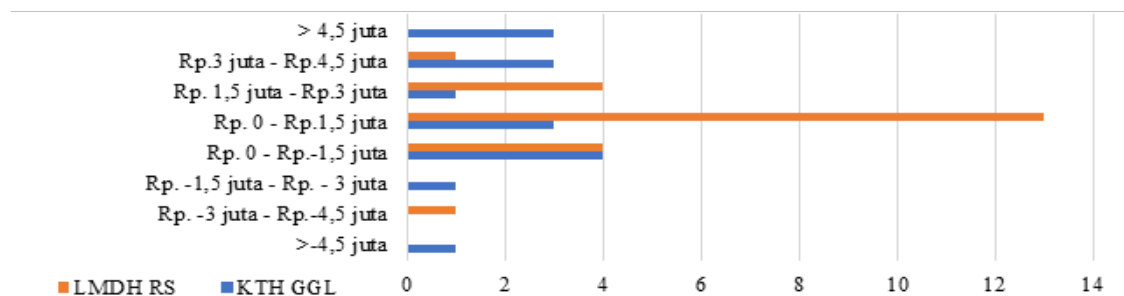
bagian ini akan dilihat bagaimana pandangan para informan dalam kegiatan menggarap kawasan hutan baik di KTH GGL atau LMDH RS.

Untung dan rugi yang dilihat dalam tulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama berdasarkan pandangan dari informan sendiri sendiri dan kedua didasarkan dari data yang didapatkan yang kemudian dihitung antara pengeluaran atau modal dan hasil yang didapatkan. Sehingga terdapat beberapa kategori jawaban khususnya di LMDH RS dibandingkan dengan yang ada di KTH GGL. Didasarkan data yang didapatkan kebanyakan dari informan anggota di LMDH RS menyatakan bahwa menggarap di kawasan hutan cenderung “rugi” dan “kurang hasil”, sedangkan mereka yang menyebutkan untung atau ada tambahan jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan pada KTH GGL, kecenderungan yang muncul adalah mereka merasa untung, meskipun terdapat sedikit perbedaan jumlah dengan mereka yang merasakan rugi menggarap di kawasan hutan. Lebih rinci perbedaan pandangan untung atau rugi pada kedua kelompok dapat dilihat pada Gambar 1.

Penggambaran untung atau rugi ini terlihat sangat subjektif tidak dapat menjelaskan seperti apa manfaat yang didapatkan secara jelas, maka dari itu ditelaah dan diolah data untuk melihat keuntungan dan kerugian yang terjadi pada informan anggota KTH GGL dan LMDH RS. Perhitungan ini adalah perhitungan kasar yang masih banyak kekuarungannya karena keterbatasan data, namun setidaknya perhitungan ini



Gambar 1. Perasaan Untung atau Rugi Menggarap di Hutan  
 Figure 1. Feeling of Profit or Loss Working in Forest



Gambar 2. Pengelompokan Untung dan Rugi dari Perhitungan Kasar Pemanfaatan Kawasan Hutan di KTH GGL dan LMDH RS

Figure 2. Profit or Loss Categorization based on Rough Calculation of Forest Area Utilization in KTH GGL and LMDH RS

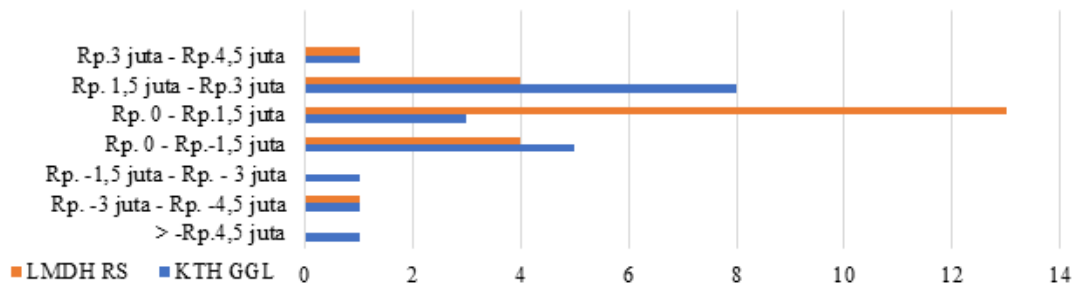
diharapkan dapat memberikan gambaran seperti apa distribusi manfaat dari menggarap hutan yang penulis sudah coba kelompokkan, seperti Gambar 2.

Berdasarkan grafik pada Gambar 2, maka dapat dilihat bahwa memanfaatkan kawasan hutan baik di KTH GGL dan LMDH RS cenderung pada memperoleh keuntungan, meskipun ada beberapa informan anggota yang mengalami kerugian bahkan sampai lebih dari 4,5 juta. Hal yang menarik dari perhitungan kasar antara keuntungan dan kerugian ini adalah persebaran keuntungan yang didapatkan oleh anggota informan antara KTH GGL dan LMDH RS. Dapat dilihat bahwa kecenderungan keuntungan di LMDH RS cenderung pada keuntungan dengan tingkat pendapatan sampai dengan Rp.1,5 juta dalam sekali masa tanam dari komoditas yang digarap di kawasan hutan. Pada gilirannya distribusi manfaat keuntungan di KTH GGL memiliki jumlah yang seimbang antara yang untung sampai Rp.1,5 juta, Rp.3-4,5 juta, dan lebih dari Rp.4,5 juta, meskipun jumlah terbesar di KTH GGL dari pengelompokan ini adalah untung Rp.1,5 juta.

Lebih lanjut terdapat perbedaan antara informan anggota di KTH GGL dan LMDH RS, seperti yang dijelaskan sebelumnya dimana kebanyakan informan anggota justru menanam komoditas jagung yang memerlukan banyak modal. Ternyata

kebanyakan dari informan anggota di KTH GGL menggunakan menggunakan sistem “bon” atau berhutang terlebih dahulu kepada “Juragan” (pemilik modal) untuk menanam jagungnya. Maka dari itu keuntungan dari informan anggota yang didapatkan mungkin tidak sebesar berdasarkan hitungan kasar pada grafik 2 karena didapatkan informasi bahwa informan anggota yang nge-“bon” dengan juragan akan dimahalkan biaya sarana produksi seperti pupuk hingga obat untuk menanam jagung, belum lagi ketika penjualan hasil panennya yang harga jagungnya cenderung berkurang. Maka penting juga untuk melihat seperti apa keuntungan atau kerugian berdasarkan pandangan dan hitungan pada KTH GGL dan hitungan pada LMDH RS, seperti pada Gambar 3.

Terjadi sedikit perubahan khususnya pada mereka yang memiliki keuntungan di KTH GGL, yaitu pada perubahan kecenderungan jumlah mereka yang untung dan terkonsentrasi pada kategori keuntungan dalam kelompok Rp.1,5 – 3 juta rupiah per masa tanam. Selisih antara perhitungan kasar dengan pandangan ini yang menjelaskan adanya sebagian keuntungan yang diambil oleh para “Juragan” dari pemanfaatan kawasan hutan pada informan anggota di KTH GGL. Seperti contoh terdapatnya selisih harga pupuk yang diambil oleh juragan khususnya bagi mereka yang



Gambar 3. Untung/Rugi Pandangan dan Perhitungan pada KTH GGL dan LMDH RS  
 Figure 3. View of Profit/Loss and Calculation in KTH GGL and LMDH RS

meminjam misalnya juragan menjual pupuk Rp.230 ribu/kwintal kepada mereka yang tidak meminjam, sedangkan mereka yang meminjam dipatok harga pupuk sebesar Rp.250 ribu/kwintal.

Pada faktanya, kebanyakan dari informan anggota cenderung mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan kawasan hutan dengan bercocok tanam (agroforestry). Namun pandangan dari kebanyakan informan adalah hal yang penting untuk diperhatikan dimana kebanyakan anggota informan mengeluhkan kurang hasil atau merugi utamanya ketika terjadi panen raya yang menurunkan harga komoditas yang mereka tanam baik di LMDH RS maupun di KTH GGL. Sehingga penting untuk mencari tahu pertama adalah alasan mereka memanfaatkan kawasan hutan, kedua yaitu mencari tahu permasalahan dan ketiga mencari tahu solusi dari sudut pandang para anggota informan. Bagian berikut akan menjelaskan hal-hal tersebut.

### C. Identifikasi Alasan, Permasalahan, dan Solusi dalam Memanfaatkan Kawasan Hutan

Terdapat banyak alasan yang diungkapkan oleh para informan baik di KTH GGL dan LMDH RS untuk menggarap kawasan hutan yang mereka kelola. Namun variasi paling banyak disampaikan oleh mereka yang ada di LMDH RS dibandingkan dengan KTH GGL. Secara jelas informan anggota yang ada di KTH GGL memiliki

satu kecenderungan utama sebagai alasan mereka menggarap kawasan hutan. Alasan tersebut adalah “kemudahan modal, pemasaran, dan pinjaman hidup dari sang Juragan”, kecenderungan ini yang erat kaitannya dengan kuatnya alasan informan anggota KTH GGL dalam menanam komoditas jagung di kawasan hutan mereka. Menanam jagung dengan meminjam modal dari Juragan sekaligus meminjam uang untuk kebutuhan hidup ini yang sudah menjadi kebiasaan pada informan anggota di KTH GGL dari masa panen hingga masa panen berikutnya. Bahkan ada pandangan informan yang menyebutkan meskipun merugi dia akan terus menanam jagung karena itu lah perjuangan hidup mereka dengan berhutang dan membayar hutang ketika panen, disamping meminjam dari Juragan juga memudahkan mereka ketika terdapat kebutuhan mendesak.

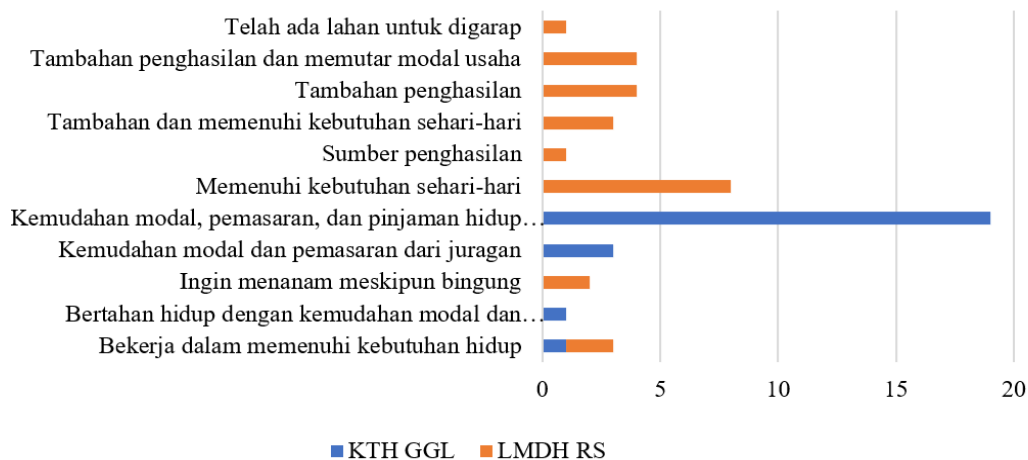
Berbeda dengan KTH GGL, pada informan anggota LMDH RS terdapat tiga kecenderungan alasan mereka untuk menggarap kawasan hutan yaitu utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tambahan penghasilan, dan tambahan penghasilan untuk memutar modal usaha. Sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari komoditas singkong dapat berfungsi sebagai lauk bagi sebagian informan jika mereka tidak memiliki lauk meskipun singkong hanya dipanen setahun sekali dengan sistem tebas. Sistem tebas adalah sistem pemanenan pada sebuah bidang tanah yang ditanam oleh

petani dimana kegiatan pemanenan dilakukan oleh “bakul” (pihak yang membeli hasil pertanian) dan petani langsung menerima sejumlah uang tanpa harus ikut memanen. Petani tidak mengetahui berapa jumlah hasil panennya, pada posisi ini Bakul berpotensi mendapatkan hasil panen yang lebih banyak dari sejumlah uang yang dikeluarkan.

Kemudian, terdapat sebagian informan anggota LMDH RS yang juga menanam jagung dan hasilnya mereka gunakan untuk dikonsumsi sendiri dan mungkin dijual ketika mereka membutuhkan sejumlah uang dengan harga Rp.3.000,- sampai Rp.4.000,-/kg. Selebihnya alasan untuk tambahan penghasilan merefleksikan bahwa menanam di kawasan hutan adalah pekerjaan sampingan dimana mereka menanam di kawasan hutan dan dibiarkan sambil menunggu panen karena kebanyakan informan anggota LMDH RS cenderung memiliki lahan pribadi dibandingkan pada informan anggota KTH GGL. Seperti sebagian informan anggota yang bekerja sebagai penyadap getah yang tidak setiap hari harus ke lahan garapannya, berbeda dengan mereka yang ada di KTH GGL dimana setiap hari ke lahan garapannya. Pembiaran garapan ini yang pada akhirnya mungkin terkait dengan kurangnya hasil panen yang didapat, dimana beberapa

informan menyebutkan bahwa menggarap kawasan hutan butuh keuletan dan kemauan untuk mengurus lahannya. Selebihnya alasan lainnya dari menggarap di kawasan hutan dapat dilihat pada Gambar 4.

Kebiasaan menanam jagung, menurut informan pengurus KTH GGL adalah sebuah permasalahan karena informan anggota berada pada posisi kebergantungan dan dimanfaatkan oleh Juragan. Beberapa informan anggota juga mengakui dan merasakan mahal biaya sarana produksi untuk menanam jagung jika mereka mengambilnya dari Juragan, namun di sisi lain mereka juga tidak memiliki banyak pilihan lainnya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan modal disertai pandangan bahwa yang kegiatan yang menghasilkan cenderungnya adalah menanam jagung. Lebih lanjut permasalahan pemasaran adalah hal yang menjadi pertanyaan berikutnya yang dirasakan oleh informan anggota, dimana untuk jagung arus pemasarannya sudah jelas dan pasti terjual dengan resiko terjadinya penurunan harga ketika panen raya. Belum lagi permasalahan hama jagung itu sendiri mulai dari babi hutan, monyet bahkan tikus, hal tersebutlah yang menjadikan informan anggota di KTH GGL harus setiap hari datang ke lahan garapannya agar mencegah terjadinya pengrusakan yang



Gambar 4. Alasan Memanfaatkan Kawasan Hutan di Informan Anggota KTH GGL dan LMDH RS  
 Figure 4. The reasons of Forest Area Utilization in KTH GGL and LMDH RS members'



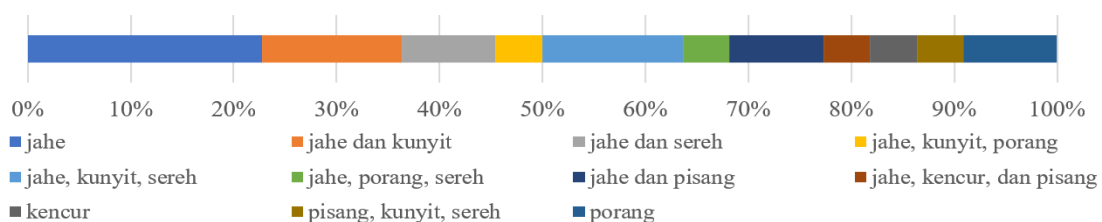
berpotensi pada berkurangnya hasil bahkan mungkin gagal panen.

Permasalahan alternatif komoditas juga menjadi permasalahan di LMDH RS, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya yang dilihat dari komoditas maka kebanyakan informan cenderung menanam tanaman di bawah tegakan seperti singkong, pisang, dan cabai miskin dipandang kurang menghasilkan. Maka ketika ditanyakan alternatif apa yang dapat lebih meningkatkan pendapatan dalam memanfaatkan kawasan hutan, maka 91,3% informan anggota ragu dan bingung, 4,3% mau mencoba namun terkendala modal, dan 4,3% yakin namun perlu membuktikan. Namun besarnya persentase ragu dan bingung (disingkat RB) di LMDH RS terdiri dari beberapa kelompok yang terdiri dari (RB) terlalu rimbun dan takut (41,7%; 8,5%), (RB) percobaan alternatif komoditas gagal dan tidak hasil (16,7%), (RB) harga yang tidak menentu (12,5%), dan (RB) terhadap pengurus dan oknum (8,3%). Sehingga dapat dilihat setengah informan anggota (50,2%) pada LMDH RS memiliki keraguan dan kebingungan terlalu rimbun tegakan pokok yaitu pohon pinus disertai dengan takutnya anggota dari tindakan yang mungkin dilakukan oknum dari Perum Perhutani, karena anggota di LMDH RS memiliki pandangan bahwa mereka “kontrak” atau hanya menumpang menggarap di atas kawasan Perum Perhutani. Kemudian keraguan dan kebingungan itu diperkuat dengan percobaan menanam kopi yang tidak kunjung menghasilkan atau gagal yang dirasakan sebagian informan.

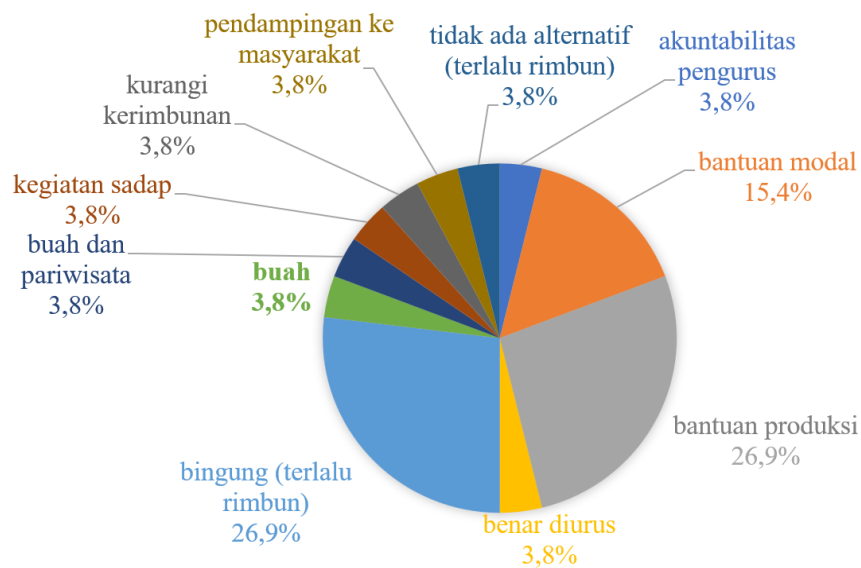
Berdasarkan permasalahan baik di KTH GGL dan LMDH RS ini yang penting untuk melihat seperti apa alternatif atau solusi yang diharapkan dari informan anggota pada akar rumput. Pada alternatif yang diharapkan oleh informan anggota KTH GGL meskipun 30,8% merasa ragu dan bingung, namun 38,46% informan anggota cenderung mau mencoba meskipun terkendala modal dan masih sedikit bingung untuk pada tanaman alternatifnya. Alternatif komoditas yang berpotensi menurut informan anggota KTH GGL utamanya adalah adalah jahe (22%), dan selebihnya kombinasi jahe dengan komoditas yang berpotensi lainnya seperti kunyit, serih, porang, kencur, dll mencapai 81,81% yang dipandang dapat menjadi alternatif, seperti Gambar 5.

Sedikit berbeda dengan identifikasi alternatif pada informan anggota di KTH GGL, maka identifikasi alternatif yang ada di LMDH RS belum sampai pada pengidentifikasian komoditas tertentu. Pengidentifikasian alternatif di LMDH RS masih sangat terkait dengan permasalahan yang ada dan cenderung bersifat umum dari pandangan informan anggota. Berikut adalah Gambar 6., yang menggambarkan pengidentifikasian solusi alternatif di LMDH RS.

Jika digabungkan terkait dengan kerimbunan, maka 34,61% masih terfokus terkait dengan permasalahan kerimbunan dari tanaman pokok yang dirasa informan anggota mungkin dapat dikurangi atau memang tidak ada alternatif lainnya. Persentase alternatif terbesar kedua adalah



Gambar 5. Identifikasi Alternatif Komoditas di KTH GGL (Sudut Pandang Anggota)  
 Figure 5. Alternative Commodity Identification in KTH GGL (based on members' view)



Gambar 6. Pengidentifikasian Solusi Alternatif di LMDH RS (Sudut Pandang Anggota)  
 Figure 6. Alternative Solution Identification in LMDH RS (based on members' view)

bantuan sarana produksi (26,9%), sebagian informan mengharapkan dapat bantuan seperti pupuk atau benih dari tanaman alternatif yang mungkin dapat ditanam seperti yang dicontohkan oleh informan pengurus LMDH yaitu menanam nanas. Karena memang pada kenyataannya menanam selain singkong dan pisang membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Selebihnya persentase alternatif terbesar ketiga adalah bantuan modal (15,4%), sejalan dengan penjelasan sebelumnya modal masih menjadi masalah bagi para informan anggota di KTH GGL untuk beralih komoditas disamping kurang yakin dan kurang mengetahui komoditas apa yang dapat menghasilkan dan menguntungkan. Karena kebiasaan di sana selain menanam singkong dan pisang, maka untuk untuk adalah menanam cabai, Karena memang kombinasi yang yang paling menguntungkan dari menggarap kawasan hutan adalah menanam singkong dan cabai (53,85%) dari pada kombinasi singkon dan jenis komoditas lainnya.

Namun menanam cabai ini tidak bisa dilakukan di bawah tegakan. Menanam cabai juga cenderung membutuhkan banyak modal

seperti harus membeli obat, plastik, atau pupuk. Kemudian terdapat juga informasi yang menjelaskan bahwa kurangnya kemauan dari sebagian informan anggota jika bantuan modal yang diberikan dalam bentuk pinjaman seperti pinjaman bank yang harus membayar secara rutin. Argumen informan anggota ini menjadi masuk akal karena memang menurut informan pengurus petani tidak memiliki pendapatan rutin yang jelas dan pasti terlebih permasalahan harga yang naik turun dari sang Bakul.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Adanya program perhutanan sosial dipandang memberikan manfaat ekonomi meskipun dirasa kurang maksimal bagi para anggota yang ada dalam lingkup KTH GGL dan LMDH RS sebagai dua dari beberapa model Perhutanan Sosial di Indonesia. Dibalik pandangan negatif dari para informan, setidaknya program perhutanan sosial dapat memberikan akses lahan yang dapat dikelola utamanya bagi para informan di LMDH RS dan yang cenderung di KTH GGL karena kurang memiliki lahan pribadi.

Adanya akses lahan dari kawasan hutan ini yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Desa Gongseng termasuk anggota KTH GGL sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kembali pada perhitungan kasar, data yang muncul dari para informan anggota dari pemanfaatan kawasan hutan menunjukkan terdapat peningkatan pendapatan sekitar Rp.1,5 – 3 juta/masa tanam (berkisar 100 hari atau  $\pm 3$  bulan). Keuntungan ini berpotensi bisa lebih tinggi lagi karena terdapat beberapa komoditas yang belum dapat dihitung seperti pohon buah-buahan yang belum berbuah, kurang dapat dihitung seperti komoditas pisang atau memang tidak dihitung seperti pemenuhan pakan ternak yang didapat dari dedaunan atau semak di hutan.

Pada sisi lainnya terdapat juga mereka yang mengalami kerugian dalam memanfaatkan kawasan hutan sebagai sebuah kesempatan dari terbatas peluang yang mereka miliki untuk dapat bertahan hidup atau mendapatkan tambahan penghasilan bagi petani yang ada di sekitar hutan. Aspek penting yang perlu digaris bawahi dalam penelitian ini adalah kedua kelompok ini memiliki konteks kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Seperti contoh pada KTH GGL penting untuk mencari solusi komoditas apa yang dapat dikembangkan selain jagung dan seperti apa pemasarannya. Sedangkan pada LMDH RS penting untuk mencari alternatif tanaman apa yang dapat dikembangkan dengan karakteristik dataran tinggi yang mungkin menghasilkan dan dapat tumbuh di bawah tegakan. Karakteristik yang berbeda ini yang penting untuk diperhatikan di dalam pengidentifikasian alternatif kedepannya bagi para pihak terlebih bagi para pembuat kebijakan agar dapat secara tepat merumuskan cara dan alternatif dalam meningkatkan manfaat ekonomi hingga di tingkat anggota.

## **B. Saran**

Pada penelitian selanjutnya jika dilakukan penelitian pada lokasi yang sama maka penting untuk menelaah pemasaran dari alternatif-alternatif komoditas yang ada atau akan dilakukan pada KTH GGL. Pada sisi lainnya untuk konteks LMDH RS perlu dilakukan penelaahan potensi komoditas yang dapat dikembangkan yang sesuai dengan kondisi fisik, tanah, kelembaban atau aspek-aspek lainnya didasarkan oleh ilmu pengetahuan alam. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa menanam di hutan seperti buah-buahan dipandang sebagai upaya yang kurang menghasilkan dan cenderung dibayangi oleh kegagalan.

Terakhir pengembangan dan dukungan para stakeholder untuk kegiatan ekowisata juga dapat menjadi alternatif pendorong akses ekonomi pada kedua kelompok. Dimana kegiatan ekowisata di LMDH RS dan KTH GGL telah dimulai sejak awal kelompok menerima izin di tahun 2017 (KLHK, 2017b, 2017a) namun pada 2020 terjadi penurunan kegiatan akibat dampak dari pandemi Covid-19.

## **UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)**

Penulis mengucapkan terima kasih yaitu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atas program beasiswa byresearch, kepada Kedepuitan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI) yang sekarang telah berubah menjad Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai penyandang dana penelitian. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan penelitian dari BUPSHA-KLHK, KTH GGL, LMDH RS, dan pihak lainnya yang terlibat di dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjo, D. (2019). Mainstreaming community-based forest management in west sumatra: Social forestry arguments, support, and implementation. *Forest and Society*, 3(1), 77–96. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.4047>.
- Checkland, P. (2000). *Soft Systems Methodology : A Thirty Year Retrospective a*. 58, 11–58.
- CIFOR. (2007). Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM): Kolaborasi antara masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa. In *Uni Eropa, CIRAD, CIFOR, UGM, Perum Perhutani*. [https://www2.cifor.org/lpf/docs/java/LPF\\_Flyer\\_PHBM.pdf](https://www2.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf).
- Ekawati, S., Suharti, S., & Anwar, S. (2020). *Bersama Membangun Perhutanan Sosial* (S. Ekawati, S. Suharti, & S. Anwar (eds.); Cetakan 1.). Penerbit IPB Press.
- Essougong, U. P. K., Foundjem-Tita, D., & Minang, P. A. (2019). Addressing equity in community forestry: Lessons from 20 years of implementation in cameroon. *Ecology and Society*, 24(1). <https://doi.org/10.5751/ES-10656-240109>.
- Firdaus, Y. A. (2018). *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*. <https://doi.org/10.17528/cifor/006856>.
- Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the New Social Forestry Project in Indonesia: Recognition, Livelihood and Conservation? *International Forestry Review*, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>.
- FWI/GFW. (2001). *Keadaan Hutan Indonesia*. Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch.
- Hayati, N. (2021). Valuasi Ekonomi Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 18(3), 153–169. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2021.18.3.153-169>.
- Hendarto, K. A., Hasan, R. Al, Yumantoko, Nur, A., & Ariawan, K. (2019). The Economic Value Of Recreational Benefit of Aik Nyet Nature Tourism, KPH Rinjani Barat: An Application of the Travel Cost Methods. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 16(1), 43–54. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2019.16.1.43-54>.
- Hidayat, D. C., Maryani, R., Irawanti, S., Susanto, M. L., & Witono, J. R. (2020). Analisis Finansial Pupuk Organik Cair Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Harapan Maju di Desa Mobui Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2020.17.1.1-12>.
- Hidayat, H. (2015). *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik* (H. Hidayat (ed.)). Yayasan Pustaka Obor.
- Jariyah, N. A. (2019). Evaluasi Kinerja Sosial Ekonomi DAS Brantas Berdasarkan Penerapan P61/Menhut-II/2014. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 16(9), 95–114.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A. J., & Inoue, M. (2017). Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: A case study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*, 36(3), 250–263. <https://doi.org/10.1080/10549811.2017.1296774>.
- Kelly, E. C. (2018). The Role of the Local Community on Federal Lands: the Weaverville Community Forest. *Humboldt Journal of Social Relations*, 15(40), 163–177. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/90023270>.
- KLHK. (2017a). *Profil Kelompok KTH Gunung Gajah Lestari*.
- KLHK. (2017b). *Profile LMDH Rawa Sakti*.
- Kuncoro, M., & Cahyani, D. (2018). Performance of social forestry on farmers' revenues: lessons from Yogyakarta and Lampung, Indonesia. *The Business & Management Review*, 9(4), 275–289.
- Lugina, M., Indartik, & Pribadi, M. A. (2019). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove dan Kontribusinyaterhadap Pendapatan Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Sosial dan Kehutanan*, 16(3), 197–210.
- Mehregan, M. J., Hosseinzadeh, M., & Kazemi, A. (2012). An application of Soft System Methodology. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 41, 426–433. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.04.051>.
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Bong, I. W., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2017). Social forestry- why and for whom? A comparison of policies in vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 78–97. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>.
- Nath, T. K., Jashimuddin, M., & Inoue, M. (2016). Community-Based Forest Management (CBFM) in Bangladesh. In *World Forests* (Vol. 22, Issue August 2018). <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10549811.2016.1231615>.
- Noveria, M., Mashudi, Gayatri, I. H., & Mulyani, L. (2005). *Hutan, Masyarakat dan Pasar: Usulan Perubahan Paradigma dan Reformasi Kebijakan Sumber Daya Hutan*. LIPI Press. <http://penerbit.lipi.go.id/penerbitan.cgi?daftar&1107298611&9951&&semua>.
- Nurrochmat, D. R., Massijaya, M. Y., Jaya, I. N. S., Abdulah, L., Ekayani, M., Astuti, E. W., & Erbaugh, J. T. (2019). Promoting community



- forestry to reduce deforestation surrounding Gunung Rinjani National Park in Central Lombok, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 285(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/285/1/012014>.
- Pambudi, A. S. (2020). The Development of Social Forestry in Indonesia. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.11>.
- Pujo, Sofhani, T. F., Gunawan, B., & Syamsudin, T. S. (2018). Community capacity building in social forestry development: A review. *Journal of Regional and City Planning*, 29(2), 113–126. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.2.3>.
- Quazi, S. a, Bushley, B. R., & Miles, W. B. (2008). Introduction: Participation and the collaborative management of protected areas in Bangladesh. In *Connecting communities and conservation: Collaborative management of protected areas in Bangladesh. USA: United States Agency for International Development (USAID)* (pp. 1–25). <https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/fileadmin/resources/publications/PDF/connectingcommunities02introduction.pdf>.
- Rachmawan, D. (2020). *Focus Group Discussion dengan KLHK*.
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111(1), 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>.
- Royer, S. De, Noordwijk, M. Van, & Roshetko, J. M. (2018). Does community-based forest management in Indonesia devolve social justice or social costs? *International Forestry Review*, 20(2), 167–180. <https://doi.org/10.1505/146554818823767609>.
- Santika, T., Wilson, K. A., Budiharta, S., Kusworo, A., Meijaard, E., Law, E. A., Friedman, R., Hutabarat, J. A., Indrawan, T. P., St. John, F. A. V., & Struebig, M. J. (2019). Heterogeneous impacts of community forestry on forest conservation and poverty alleviation: Evidence from Indonesia. *People and Nature*, 1(2), 204–219. <https://doi.org/10.1002/pan3.25>.
- Saputro, D., Supardi, S., & Marwanti, S. (2020). Analisis Kelayakan Finansial Pengusahaan Kayu Sengon (*Paraserianthes falcataria*) Dengan Pola Tanam Agroforestry di Kabupaten Magetan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 17(1), 29–37. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2020.17.1.29-37>.
- Surati, S., Irawanti, S., Hidayat, D. C., Handoyo, H., Ariawan, K., Kurniawan, A. S., & Mulyadin, R. M. (2019). Analysis of Livelihoods in Peat Land: the Case of Tanjung Jabung Barat Regency. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 16(2), 81–93. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2019.16.2.81-93>
- Susilo, A. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan Di Kota Bogor ( Studi Kasus Pedagang Sembako di Jalan Dewi Sartika Utara). *Tesis, Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Jakarta Desember 2011*, 1–92.
- Susilo, Y. S., & Nairobi. (2019). Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat (The Impact of Social Forestry on Community Incomes). *Jurnal ISEI Economic Review*, III(1), 16–27.
- Timko, J., & Webbe, J. R. (2020). *Indigenous forest governance: challenges, enabling conditions and factors for success*.
- Weissberg, L. M., Kusel, J. P., & Rodger, K. A. (2018). From conflict to collaboration. *Humboldt Journal of Social Relation*, 40(40), 178–190. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/90023271>.
- Wright, G. D., Andersson, K. P., Gibson, C. C., & Evans, T. P. (2016). Decentralization can help reduce deforestation when user groups engage with local government. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 113(52), 14958–14963. <https://doi.org/10.1073/pnas.1610650114>.
- Wulandari, C., & Kurniasih, H. (2019). Community preferences for social forestry facilitation programming in lampung, Indonesia. *Forest and Society*, 3(1), 114–132. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6026>.
- Yovani, N. (2013). Transfer Teknologi sebagai Konstruksi Sosial: Sebuah Tesis awal yang diperoleh dari Perusahaan Afiliasi Jepang dan Perusahaan Lokal Komponen Otomotif dengan menggunakan Soft Systems Methodology. ... *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*.